BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung berdiri pada tanggal 20 April 1641 M, bertepatan dengan keluarnya "Serat Piyagem" dari Sultan Ageng Mataram yang menyebutkan ping songo tahun Alif bulan Muharam. Pada saat itu pula Tumenggung Wiraangun-angun (1641-1681) sebagai Bupati Bandung Pertama, dari bukti sejarah tersebut maka ditetapkan bahwa tanggal 20 April sebagai tanggal Hari Jadi Kabupaten Bandung.

Dalam perhitungan Masehi, *"Ping Sangan Bulan Muharam Tahun Alip"* tersebut bertepatan dengan tanggal 20 April 1641. Perhitungan itu diungkapkan salah seorang Arsiparis Belanda yang bernama F. De Haan. Perhitungan F. De Haan seperti tertulis dalam buku sejarah Kabupaten Bandung yang disusun BPID dan UNPAD tahun 2003, demikian sederhana. Menurutnya, tahun Alip dalam Amanac Jawa dimulai tahun 1633 Masehi. Tahun-tahun Alip yang dialami selama Pemerintahan Sultan Agung (1613 – 1645) ialah 1633 dan 1641. Biasanya kata F. De Haan segala tindakan Raja Mataram terhadap daerah Priangan, selalu diberitahukan kepada Wedana Bupati, dalam hal ini Pangeran Rangga Gede. Dalam *serat piagem* itu, tidak disebut – sebut Rangga Gede atau pembesar Mataram di Priangan. Jadi menurut F. De Haan tidak mungkin *serat piagem* ditulis pada tahun 1633 Masehi.

Jabatan Bupati kemudian di gantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan Bupati kemudian di lanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) dari tahun 1681-1704.

Selanjutnya kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari Tumenggung Ardikusumah diserahkan kepada putranya Tumenggung Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah Pemerintah Belanda mengadakan pertemuan dengan para Bupati Wilayah Priangan di Cirebon. R. Ardisuta (1704-1747) terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut Dalem Gordah. sebagai penggantinya diangkat Putra tertuanya Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II (1707-1747).

Kala itu, jabatan bupati disebut pula sebagai Mantri Agung. Adapun pusat pemerintahan Kabupaten Bandung saat itu berada didaerah "*Krapyak"*, sebuah daerah yang tidak jauh dari aliran sungai Citarum diseputar kawasan DayeuhKolot sekarang. Dalam istilah Belanda, DayeuhKolot disebut dengan nama *"Oude Negorij"*, atau Negara Lama. Pada masa sekarang daerah itu dinamakan Kampung Citeureup yang berada di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot.

Saat Kabupaten Bandung dibentuk, jumlah penduduk hanya berkisar 300 cacah atau jiwa yang tersebar di 14 daerah. Pada masa kekuasaan Mataram, daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Bandung meliputi :

1. Tatar Ukur yang terdiri Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabangbungin, Banjaran Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo dan Ujungberung.
2. Kuripan.
3. Sagaraherang.
4. Sebagian Tanahmedang.

Setelah ditetapkan sebagai penguasa Bupati atau Mantri Agung, ada beberapa hak istimewa yang dimiliki para Bupati di Priangan termasuk Kabupaten Bandung selama masa kekuasaan Sultan Agung Mataram, diantaranya :

1. Hak Pemilik Tanah
2. Hak Penguasaan dan Pengabdian dari Penduduk
3. Hak Memungut Pajak
4. Hak atas Priangan dan Berburu
5. Hak untuk Menentukan Hukum Sendiri

Hak – hak istimewa tersebut pada tahun 1677 diambil oleh *VOC* seiring dengan penyerahan sebagian wilayah kekuasaan ini, diangggap sebagai balas jasa kepada *VOC* karena telah ikut membantu dalam penumpasan pemberontakan Trunojoyo. Adapun wilayah Priangan yang diserahkan kepada *VOC* meliputi : Kabupaten Bandung, Parakanmuncang, dan Sumedang. Penyerahan wilayah kekuasaan dilakukan Sultan Agung Mataram Susuhunan Amangkurat II kepada Admiral Speelman dari pihak *VOC.*

Dengan diserahkannya Priangan tengah ke *VOC*, maka secara otomatis Kabupaten Bandung berada dibawah genggaman *VOC* atau kompeni Belanda. Namun demikian pengambil alihan kekuasaan tidak berlangsung cepat. Karena pada tanggal 15 November 1684, Komandan Jacob Couper dan Kapten Joachung Michiel atas perintah Gubernur Jenderal Johanes Camphuijs melakukan reorganisasi wilayah Priangan menjadi 7 (Tujuh) Kabupaten, meliputi :

1. Kabupaten Bandung.
2. Kabupaten Sumedang.
3. Kabupaten Timbanganten.
4. Kabupaten Sukapura.
5. Kabupaten Parakanmuncang.
6. Kabupaten Imbanagara.
7. Kabupaten Kawasen.

Selain melakukan reorganisasi wilayah, *VOC* melakukan pula system *"Preanger Stelsel"* atas daerah Priangan sistem ini sengaja diberlakukan *VOC*, karena tujuan pokok *VOC* di daerah Priangan bukan melakukan Pemerintahan langsung, namun lebih banyak berinisiatif memungut hasil perdagangan untuk kepentingan mereka. Namun demikian untuk memperkuat legitimasi kekuasaan *VOC* ditanah Priangan, maka dikeluarkan *"Acta Van Aanstlellingen"* semacam surat pengangkatan sebagai Bupati yang dikeluarkan *VOC.*

Dengan keluarnya akta tersebut, maka para Bupati Tanah Priangan mempunyai kewajiban menyerahkan upeti kepada *VOC*. Upeti tersebut berupa

komoditas perdagangan seperti kayu, lada, nila (indigo), kapas, kopi, serta gula yang besarnya ditentukan sendiri oleh *VOC.*

Kabupaten Bandung sempat mengalami beberapa masa pemerintahan yang berbeda. Bahkan dalam bukunya perkembangan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Dari masa ke masa) yang disusun oleh R.H Lily Sumantry, H. Sulaeman Anggapraja dan H Ahmad Syafei, membagi masa Pemerintahan Kabupaten Bandung kedalam beberapa periode, masing – masing :

1. Kabupaten Bandung masa Padjajaran.
2. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Islam.
3. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Sumedang Larang.
4. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan VOC.
5. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Aria Cirebon.
6. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Daendles.
7. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Raffles.
8. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Belanda dari tahun 1816 s/d 1942.

Pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763-1794) Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786 dia memasukkan Batulayang kedalam Pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794-1829) inilah Ibukota Kabupaten Bandung di pindahkan dari Karapyak (Dayeuh kolot) ke Pinggir sungai Cikapundung atau Alun - alun Kotamadya Bandung sekarang. Pemindahan

Ibukota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jendral Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan karena daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.

Setelah kepala pemerintahan di pegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846-1874) Ibukota Kabupaten Bandung Berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai Bupati yang progresif. dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung. kemudian dia memprakarsai pembangunan sekolah Raja (Pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (*Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren*). Atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung disegala bidang beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kolonial Belanda berupa Bintang jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan dalem bintang.

Dimasa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga jalan Kereta Api mulai masuk tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya jalan Kereta Api ini Ibukota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa dan Cina pun mulai menetap di Ibukota, dampaknya perekonomian Kota Bandung semakin maju. Setelah wafat penggantinya diangkat RAA. Martanegara, Bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi pemukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan RAA Martanegara (1893-1918) ini atau tepatnya pada tanggal 21

Februari 1906, kota Bandung sebagai Ibukota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya).

Periode selanjutnya Bupati Kabupaten Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakusumah V (Dalem Haji) yang menjabat selama 2 periode, pertama tahun 1912-1931 sebagai Bupati yang ke 12 dan berikutnya tahun 1935-1945 sebagai Bupati yang ke 14. Pada periode tahun 1931-1935 R.T. Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke 13. Selanjutnya pejabat Bupati ke 15 adalah R.T.E. Suriaputra (1945-1947) dan penggantinya adalah R.T.M Wiranatakusumah VI alias aom Male (1948-1956), kemudian diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai Bupati ke 17 yang dijabatnya hanya 1 tahun (1956-1957).

Sebagai Bupati berikutnya adalah Letkol R. Memet Ardiwilaga (1960-1967). Kemudian pada masa transisi kehidupan politik Orde Lama ke Orde Baru adalah Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yaitu daerah Baleendah. Peletakan Batu Pertamanya pada tanggal 20 April 1974 yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke - 333. Rencana kepindahan Ibukota tersebut berlanjut hingga jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980-1985). Atas pertimbangan secara fisik geografis daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten, maka ketika Jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985-1990), Ibukota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Dipinggir Jalan Raya Soreang

tepatnya di Desa Pamekaran inilah di Bangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 Ha, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan sehingga kompleks perkantoran ini disebut-sebut sebagai kompleks perkantoran termegah di Jawa Barat. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dan dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U.Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut dirampungkan dalam kurun waktu 1990-1992.

Tanggal 5 Desember 2000, Kolonel H. Obar Sobarna S.Ip. terpilih oleh DPRD Kabupaten Bandung menjadi Bupati Bandung dengan didampingi oleh Drs. H. Eliyadi Agraraharja sebagai Wakil Bupati. Sejak itu, Soreang betul-betul difungsikan menjadi pusat Pemerintahan.Tahun 2003 semua aparat Daerah, kecuali Dinas Pekerjaan umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Kantor BLKD, dan Kantor Diklat, sudah resmi berkantor di komplek perkantoran Kabupaten Bandung. Pada masa pemerintahan H. Obar Sobarna S.Ip. telah dibangun Stadion Olahraga si Jalak Harupat, yaitu stadion bertaraf internasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu pada masa pemerintahan Obar Sobarna, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diperkuat oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Kota Administratif Cimahi berubah status menjadi Kota Otonom. Tanggal 5 Desember 2005. H. Obar Sobarna, S.Ip menjabat Bupati Bandung untuk kedua kalinya didampingi oleh H. Yadi Srimulyadi sebagai Wakil Bupati, melalui proses pemilihan langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

Dimasa pemerintahan H. Obar Sobarna yang kedua ini, berdasarkan dinamika masyarakat dan didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian dari 5 perguruan tinggi, secara yuridis sudah terbentuk Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propinsi Jawa Barat.

Setelah berakhirnya masa jabatan Bupati H. Obar Sobarna dan Wakil Bupati H. Yadi Srimulyadi pada tahun 2010, maka penggati Bupati dan Wakil Bupati Bandung ialah H. Dadang Mochammad Nasear sebagai Bupati dan H. Deden Rukman Rumaji sebagai Wakil Bupati yang unggul saat Pilkada 2010 putaran ke dua untuk periode 2011-2015 dan dilantik pada tanggal 15 Desember 2010.

Berdasarkan Visi & quot yakni "Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural, dan Berwawasan Lingkungan". Serta dengan Motto "***Sabibilungan"*** yang diterapkan kepada warga Kabupaten Bandung agar senantiasa selalu bekerja sama.

Hingga usia 366 tahun, Kabupaten Bandung telah diperintah oleh 28 Bupati, dengan susunan sebagai berikut :

1. Tumenggung Wira Angun-angun Tahun 1641-1670
2. Tumenggung Nyili Tahun 1670-1681
3. Tumenggung Ardikusumah Tahun 1681-1704

4. Tumenggung Ardisuta (Tumenggung Anggadiredja I) Tahun 1704-1747
5. Demang Natapradja (Tumenggung Anggadiredja II) Tahun 1747-1763
6. Tumenggung Anggadiredja III (Wiranatakusumah I) Tahun 1763-1794
7. R.A. Wiranatakusumah II (Dalem Kaum) Tahun 1794-1829
8. R.A. Wiranatakusumah III (Dalem Karang Anyar) Tahun 1829-1846
9. R A. Wiranatakusumah IV (Dalem Bintang) Tahun 1846-1874
10. R.A. Kusumadilaga (Dalem Marhum) Tahun 1874-1893
11. R.A.A. Martanegara Tahun 1893-1918
12. R.H.A.A. Wiranatakusumah V (Dalem Haji) Tahun 1920-1931
13. R.T. Hasan Sumadipradja Tahun 1931-1935
14. R.H.A.A. Wiranatakusumah V Tahun 1935-1945
15. R.T.E. Suriaputra Tahun 1945-1947
16. R T M Wiranatakusumah VI (Aom Male) Tahun 1948-1956
17. R. Apandi Wiradiputra Tahun 1956-1957
18. Letkol Inf. H. Memed Ardiwilaga Tahun 1960-1967
19. Kol. Inf. (Anumerta) Masturi Tahun 1967-1969
20. Letkol CAJ. R.H. Lily Sumantri Tahun 1969-1975 (I)
21. Letkol CAJ. R.H. Lily Sumantri Tahun 1975-1980 (II)
22. Kol. Inf. Sani Lupias Abdurrahman Tahun 1980-1985
23. Kol. CHI. J. D Cherman Effendi Tahun 1985-1990
24. Kol. CI. H. U. Hatta Djatipermana, S.IP Tahun 1990-1995 (I)

25. Kol. CI. H. U. Hatta Djatipermana, S.IP Tahun 1995-2000 (II)

26. Kol. Inf. (Purn) H. Obar Sobarna, S. IP Tahun 2000-2005 (I)

27. Kol. Inf. (Purn) H. Obar Sobarna, S. IP Tahun 2005-2010 (II)

28. H. Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip Tahun 2011-Sekarang

Gambar 1.1

Foto Bupati Bandung

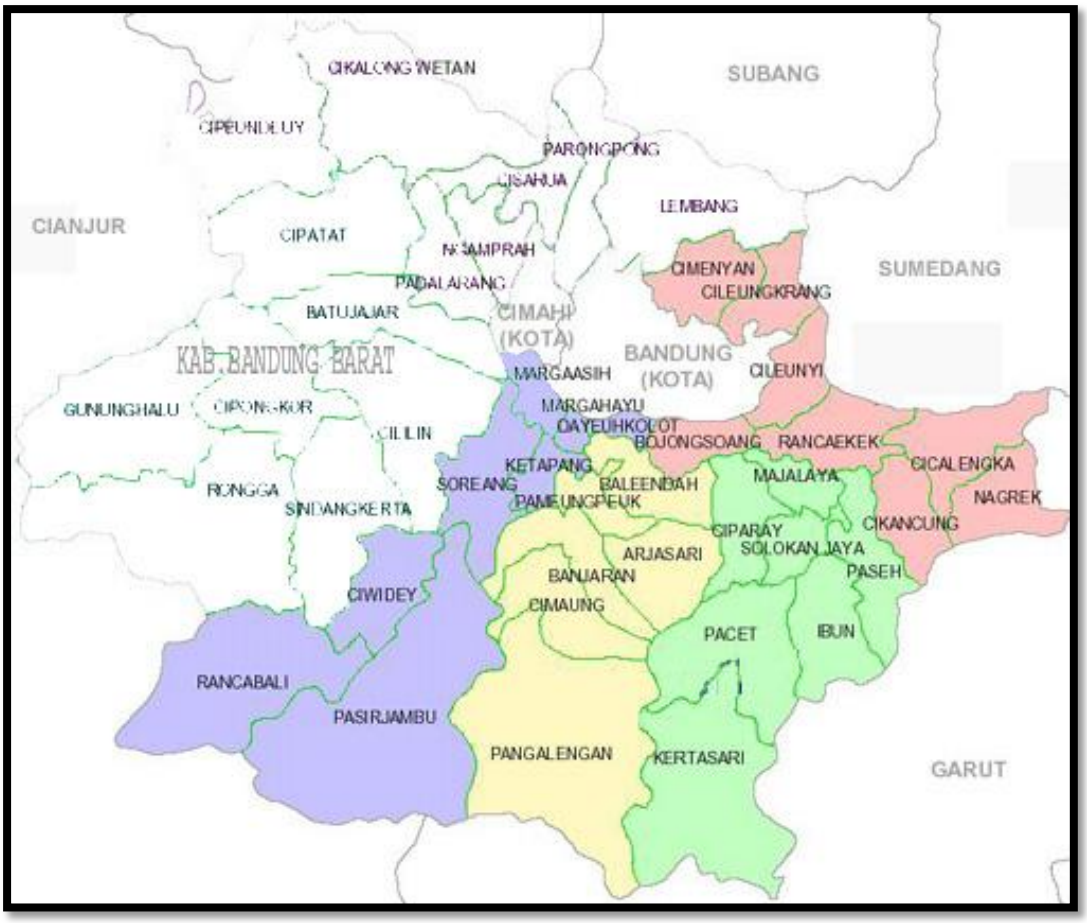


Sumber : Bagian Humas Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan Setda Pemerintahan Kab. Bandung, 2011.

Selain itu Kabupaten Bandung memiliki wilayah yang terdiri dari 31 kecamatan, yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.2

Peta Wilayah Kabupaten Bandung



Sumber : Bagian Humas Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan Setda Pemerintahan Kab. Bandung, 2011.

Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah **Soreang**. Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6°,41’ – 7°,19’ Lintang Selatan dan diantara107°22’ –

108°5’ Bujur Timur dengan luas wilayah 176.239 ha. Batas Utara Kabupaten Bandung Barat; Sebelah Timur Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; Sebelah Selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur sebelah Barat Kabupaten Bandung Barat; di bagian Tengah Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 266 Desa dan 9 Kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.943.283 jiwa (Hasil Analisis 2006) dengan mata pencaharian yaitu disektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan dan jasa.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan. Di antara puncak-puncaknya adalah: Sebelah utara terdapat Gunung Bukittunggul (2.200 m), Gunung Tangkubanperahu (2.076 m) (Wilayah KBB) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan di selatan terdapat Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), serta Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

Wilayah Kabupaten Bandung beriklim tropis dipengaruhi oleh angin muson dengan curah hujan rata – rata berkisar antara 1500 sampai dengan 4000mm /tahun, suhu rata – rata berkisar antara 19°C sampai dengan 24°C.

1.1.1 Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Bandung

a. Visi Pemerintahan Kabupaten Bandung

Adapun Visi dari Pemerintahan Kabupaten Bandung, yakni :

"Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural, dan Berwawasan Lingkungan."

b. Misi Pemerintahan Kabupaten Bandung

Untuk mewujudkan Visi diatas, maka harus ditetapkan juga Misi yang harus mendapatkan perhatian yang seksama dimana tugas yang diemban oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung adalah:

1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi Atau *Good Government And Clean Government*;
2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Menetapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman Dan Taqwa);
3. Memantapkan Pemulihan Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Menggali, Menumbuhkembangkan Dan Melestarikan Budaya Sunda Serta Kearipan Local Lainnya;
5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan;

6. Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Serta Keterpaduan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah;
7. Meningkatkan Partisifasi Sector Swasta, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah.

1.1.2 Logo dan Arti Logo Pemerintahan Kabupaten Bandung

a. Logo Pemerintahan Kabupaten Bandung

Gambar 1.3

Logo Pemerintahan Kabupaten Bandung



Sumber : Bagian Humas Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan Setda Pemerintahan Kab. Bandung, 2011.

b. Arti Logo Pemerintahan Kabupaten Bandung

Arti logo Pemerintahan Kabupaten Bandung yang berbentuk perisai terbagi atas lima bagian, yaitu :



1. Bagian kanan atas berlatar kuning emas.

Dengan gambar gunung (Gunung Tangkuban Perahu) berwarna hijau, melambangkan bahwa Kabupaten Bandung termasyhur karena tanahnya yang subur di daerah bergunung-gunung, dan sebagai cirri memiliki gunung Tangkuban Perahu yang sangat terkenal dengan legenda Sangkuriang.



2. Bagian melintang bergerigi.

Merupakan bentuk bendungan kokoh kuat berwarna hitam. Melambangkan masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pendirian yang kokoh dan kuat, baik secara fisik dalam membendung hawa nafsu.



3. Pohon kina berwarna hijau dan berlatar belakang merah.

Pohon kina berwarna hijau dan berlatar belakang merah, melambangkan bahwa di tatar Kabupaten

Bandung memiliki lahan perkebunan yang cukup luas dan perkebunan kina di Kabupaten Bandung yang terluas di Asia dengan kualitas baik.



4. Garis - garis bergelombang berwarna putih dan biru

Garis - garis bergelombang berwarna putih dan biru. Melambangkan di Kabupaten Bandung kaya akan air, baik air maupun danau. Kabupaten Bandung dilintasi oleh Sungai Citarum, Cikapundung dan sungai kecil lainnya serta memiliki danau (situ) Patenggang dan Cileunca.



5. Perisai tertulis dalam pita kuning :

REPEH RAPIH KERTARAHARJA

REPEH, artinya suasana kehidupan yang aman dan tenteram. RAPIH, artinya suasana kehidupan yang rukun dan tertib dalam lingkungan yang bersih, sehat dan asri. KERTARAHARJA : Tatanan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin secara seimbang, serasi adil dan merata.

1.2 Sejarah Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung

Pembentukan Bagian Humas Pemerintahan Kabupaten Bandung yang awalnya menjadi salah satu Sub Bagian Humas yang berada di bawah Bagian Umum. Pada tahun 1983 di setiap Sekretariat Daerah Tingkat II di bentuk Bagian Humas yang membawahi tiga Sub Bagian yaitu Sub Bagian Pemberitaan, Sub Bagian Evaluasi dan Sub Bagian Dokumentasi. Yang dimana tidak terlepas dari adanya perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin meningkat dan perlu di imbangi oleh sebuah lembaga kehumasan yang tugas pokoknya yaitu menyampaikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan di masing-masing daerah kepada masyarakat melalui media cetak atau media elekronik.

Dalam perkembangannya, Bagian Humas ini ada perubahan khususnya di Kabupaten Bandung sekitaran tahun 2002/2003 yang dimana Bagian Humas ini di lebur dan disatukan dengan lembaga atau mantan-mantan kantor Departemen Penerangan Kabupaten Bandung. Departemen Penerangan pada saat Presiden Abdurrahman Wahid pun dihapus atau ditiadakan yang secara tidak langsung Bagian Humas pun tidak ada. Sementara itu para mantan-mantan Departemen Penerangan ini ditampung oleh Pemerintah Daerah dan disatukan dengan Bagian Humas yang menjadi satu badan yaitu Badan Pengembangan Informasi Daerah atau BPID. Sekitar tahun 2008 Badan Pengembangan Informasi Daerah ini bubarkan dan Bagian Humas sendiri dibentuk lagi yang berada pada posisi Sekretariat Daerah atau SETDA dan di bawah Asisten Administrasi sampai

sekarang. Pada tahun 2008 Bagian Humas terjadi perubahan pada Sub Bagiannya yakni Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan, Sub Bagian Protokol dan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Kalau melihat tugas pokoknya hampir sama yaitu membentuk pencitraan atau menyampaikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan yang menjadi target atau kegiatan pemerintah daerah kepada masyrakat dan disamping itu humas secara tidak langsung menjadi juru bicara sekretariat.

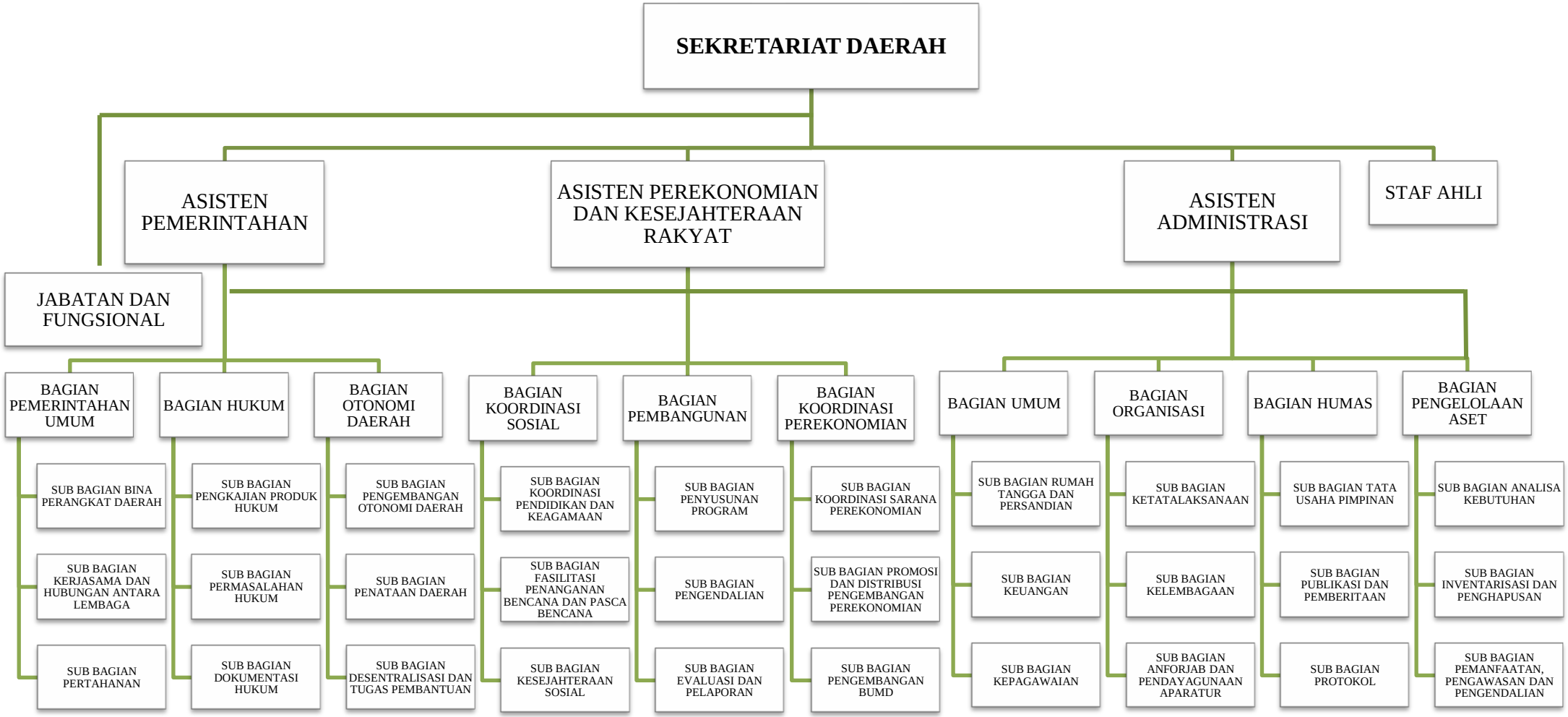
Lembaga kehumas dibentuk karena pemerintah memerlukan dan melihat bahwa dunia informasi akan berkembang secara pesat dan dibutuhkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar masyrakat lebih tahu tentang konsep pembangunan pemerintah sehingga masyarakat dapat mengetahui, memaklumi dan mengerti apa kesulitan pemerintah tentang pembangunan. Yang dimana diharapkan adanya dukungan yang positif dari masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah artinya harus adanya komunikasi yang dilakukan oleh bagian humas secara baik.

1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung

Adapun susunan struktur organisasi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada halaman 20.

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung



Sumber : Bagian Organisasi Setda Pemerintahan Kabupaten Bandung, 2011.

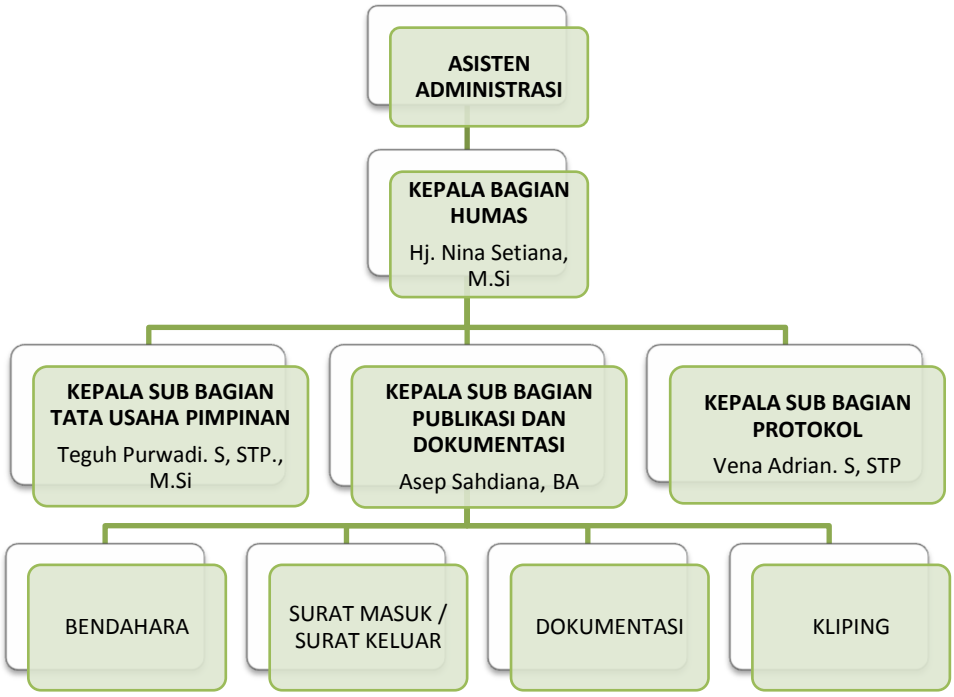
Dari bagan di atas Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung, dapat diketahui bahwa Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas atau kegiatannya dibantu oleh Sekretariat Daerah yang membawahi Asisten Pemerintah, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, serta Asisten Administrasi, dan Staf Ahli.

1.4 Struktur Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

Adapun struktur Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 1.2

Struktur Bagian Humas Setda Pemerintahan Kabupaten Bandung



Sumber : Bagian Humas Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan Setda Pemerintahan Kab. Bandung, 2011.

Dari bagan diatas Struktur Organisasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung, dapat diketahui bahwa Humas mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kapala Sub Bagian TU Pimpinan, Kapala Sub Bagian Protokol, Kapala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan yang membawahi bendahara, surat masuk / keluar, koordinasi dan informasi, dokumentasi, kliping. Pada struktur organisaasi diatas terlihat juga Bagian Humas berada di bawah atau masih dinaungi oleh Asisten Administrasi.

1.4.1 Susunan Organisasi Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung

Adapun Susunan Organisasi Asisten Administrasi yang terdiri dari :

1. Asisten Administrasi
   a. Bagian Umum, membawahkan :
      - Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian
      - Sub Bagian Keuangan
      - Sub Bagian Kepegawaian
   b. Bagian Organisasi :
      - Sub Bagian Ketatalaksanaan
      - Sub Bagian Kelembagaan
      - Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur
   c. Bagian HUMAS, membawahkan :
      - Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
      - Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan

- Sub Bagian Protokol

d. Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan :
    - Sub Bagian Analisa Kebutuhan
    - Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan
    - Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan, dan Pengendalian

1.5 *Job Description* Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung

Sebelum masuk pada *job description* Bagian Humas Setda Pemerintahan Kab. Bandung, maka penulis akan menyebutkan terlebih dahulu mengenai tujuan dari Bagian Humas Setda Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dalam pelaksanaannya sebagai penunjang pembangunan yakni, sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyampaian berbagai informasi di wilayah Kabupaten Bandung yang akurat dan mutakhir pada masyarakat Kabupaten Bandung.
2. Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas informasi menuju pemulihan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
3. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

Sedangkan uraian tugas jabatan pada Struktural Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung, antara lain :

1.5.1 Asisten Administrasi

- Asisten Administrasi dipimpin oleh seorang Asisten;
- Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah;
- Asisten Administrasi mempunyai fungsi penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah;
- Asisten Administrasi mempunyai fungsi perumusan penetapan kebijakan petunjuk teknis, tujuan, sasaran dan monitoring

penyelenggaraan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah;

- Asisten Administrasi mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan,ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah.

1.5.2 Kepala Bagian Humas

- Bagian Humas dipimpin oleh Kepala Bagian;
- Kepala Bagian Humas mempunyai tugas pokok melaksanakan, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui Pelayanan Ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah;

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal Kepala Bagian Humas menyelenggara fungsi sebagai kehumasan pemerintah daerah;
- Kepala Bagian Humas mempunyai fungsi penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah;
- Kepala Bagian Humas mempunyai fungsi pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah;
- Kepala Bagian Humas mempunyai fungsi pengkoordinasian dalam pelaksanaan pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah;
- Kepala Bagian Humas mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan administratif pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah.

1.5.3 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan tata usaha pimpinan;
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan tata usaha pimpinan;
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi pengelolaan administrasi tata usaha pimpinan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi penyusunan pelaporan kegiatan ke Tata Usahaan pimpinan Sekretariat Daerah;
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian.

1.5.4 Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan

- Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan publikasi dan pemberitaan;
- Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai fungsi penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan publikasi dan pemberitaan;
- Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai fungsi penyusunan rumusan kebijakan di bidang publikasi dan pemberitaan;
- Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai fungsi pelaksanaan analisa umpan balik di bidang publikasi dan pemberitaan;
- Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai fungsi pelaksanaan publikasi kegiatan pemerintah daerah.

1.5.5 Kepala Sub Bagian Protokol

- Sub Bagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan keprotokolan Pemerintah Daerah;
- Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas fungsi penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan keprotokolan Pemerintah Daerah;
- Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas fungsi pelaksanaan pemberian pelayanan kepada tamu Pemerintah Daerah;
- Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas fungsi pelaksanaan persiapan dan koordinasi kegiatan keprotokolan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

1.6 Sarana dan Prasarana Bagian Humas Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung

1.6.1 Sarana Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung

Letak kantor Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung terletak di tengah-tengah Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung, disebelah Gedung Moch. Toha. Terletak satu gedung dengan kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Kantor Bagian Humas merupakan tempat melayani kebutuhan informasi khususnya mengenai Pemerintahan Kabupaten Bandung dan kegiatannya baik itu internal atau eksternal.

1.6.2 Prasarana Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung

Prasarana yang dimiliki oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi 1 ruangan Kabag Humas Setda Pemkab Bandung, 1 Ruangan Kasubag Humas bagian TU, 1 Ruangan Kerja Humas bagian TU, 1 Ruangan Kasubag Humas Bagian Protokol, 1 Ruangan Kerja Humas bagian Protokol, 1 Ruangan Kasubag Humas Bagian Publikasi dan Pemberitaan, 1 Ruangan Rerja Humas Bagian Publikasi dan Pemberitaan dan 1 Ruangan tempat beribadah (Mushalla) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.1

Prasarana Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan

Kabupaten Bandung

NO	NAMA BARANG	UNIT	KEADAAN BARANG	KETERANGAN
1	Mini Bus	3	Baik	
2	Sepeda Motor	16	Baik	
3	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	Kapala Bagian
4	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	Kepala Bagian
5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik	Kepala Sub Bagian
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik	Kepala Sub Bagian
7	Meja Kerja Non Struktural	29	Baik	
8	Kursi Kerja Non Struktural	29	Baik	
9	Filling Kabinet	18	Baik	
10	Perangkat Komputer	9	Baik	
11	Telepon	2	Baik	
12	Lemari Buku	8	Baik	
13	Mesin Tik	5	Kurang Baik	
14	Mesin Tik Elektrik	1	Kurang Baik	
15	Mesin Fotocopy	2	Kurang Baik	
16	Mesin Resograf	2	Kurang Baik	
17	Sice / Kursi Tamu	4	Baik	
18	Televisi	2	Baik	

19	Laptop	3	Baik	
20	Infocus	1	Baik	
21	Lemari Es	1	Baik	
22	Mesin Hand Press	1	Baik	
23	Kamera Video	3	Baik	
24	Kamera DSLR	3	Baik	
25	Tripod	1	Baik	
26	Rak Arsip	16	Baik	
27	Lemari Besi	1	Baik	
28	Dispenser	1	Baik	

Sumber : Bagian Humas Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Pemerintahan Kab. Bandung, 2011.

Dari tabel 1.1 dapat diketahui prasarana Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung rata-rata masih dalam kondisi baik.

Tabel 1.2

Ruangan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung

NO	NAMA BARANG	UNIT	KEADAAN BARANG
1	Meja Kerja	1	Baik
2	Kursi Kerja	1	Baik
3	Sice / Kursi Tamu	1	Baik
4	Filing Cabinet	1	Baik

5	Lemari Buku	1	Baik
6	Lemari Pakaian	1	Baik
7	Bupet Buku	1	Baik
8	Televisi	1	Baik
9	Lemari Es	1	Baik

Sumber : Bagian Humas Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Pemerintahan Kab. Bandung, 2011.

Dari tabel 1.2 dapat diketahui prasarana yang berada di ruangan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung masih dalam kondisi baik.

Tabel 1.3

Ruangan Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan Bagian Humas

NO	NAMA BARANG	UNIT	KEADAAN BARANG
1	Meja Kerja Besar	1	Baik
2	Kursi Kerja Besar	1	Baik
3	Meja Kerja Kayu	1	Baik
4	Kursi Kerja	1	Baik
5	Kursi Tamu	2	Baik
6	Mesin Tik	1	Baik
7	White Board	1	Baik
8	Peta	1	Baik

Sumber : Bagian Humas Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Pemerintahan Kab. Bandung, 2011.

Dari tabel 1.3 dapat diketahui prasarana yang berada di ruangan Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung masih dalam kondisi baik.

Tabel 1.4

Prasarana Ruangan Kerja Sub Bagian Publikasi & Pemberitaan

NO	NAMA BARANG	UNIT	KEADAAN BARANG
1	Komputer	5	Baik
2	Printer	3	Baik
3	Modem	1	Baik
4	Meja dan Kursi Komputer	5	Baik
5	Meja Kerja	5	Baik
6	Kursi Kerja	5	Baik
7	Sice / Kursi Tamu	1	Baik
8	Lemari Kaca	4	Baik
9	Filling Cabinet	4	Baik
10	Kamera DSLR	3	Baik
11	Kamera Video	2	Baik
12	Tripod	1	Baik
13	Televisi	1	Baik
14	White Board	1	Baik

Sumber : Bagian Humas Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Pemerintahan Kab. Bandung, 2011.

Dari tabel 1.4 dapat diketahui prasarana yang berada di ruangan kerja Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung masih dalam kondisi baik.

1.7 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan di Pemerintahan Kabupaten Bandung di Sub Bagian Humas Publikasi dan Pemberitaan Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung yang bertempat di Komplek Pemerintahan Daerah Jalan Raya Soreang – KM 17 Kab. Bandung, Tlp. (022) 5891191, 5891192, 5891143 Fax. (022) 594, Soreang 40911. Alamat Website : http://www.bandungkab.go.id .

1.7.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang penulis ikuti yaitu selama 36 Hari. Adapun pelaksanaan PKL itu sendiri dimulai sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai 16 September 2011 di Sub Bag Humas Publikasi dan Pemberitaan Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat yang dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 WIB sesuai dengan jam kerja pegawai, kecuali di Bulan Ramadhan penulis masuk dari pukul 08.00 – 14.30 WIB, tetapi apabila ada kegiatan diluar jam kerja, penulis

mengalami penambahan jam kerja sesuai dengan kegiatan yang dihadiri oleh penulis.